

DISKURSUS NGAPAK WAYANG SANTRI

Internalisasi Agama dan Politik Lokal di Kabupaten Tegal

Zaki Mubarak

Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara (STAIBN) Tegal
zakimubarak862@gmail.com

Abstract: *Wayang Santri are one of the types of puppets who initiated by Ki Enthus Susmono. Wayang santri consists of plays played by wayang golek. In the stage, Wayang Santri always show the themes of Islamic teachings to explore the local problems and pack them in speech 'ngapak' language. One of the typical utterances in the puppet performance is the 'ana landa endase ireng'. The term is initially a medium of communication with the audience to always be alert to colonialism committed by Indonesian citizens. It found its political significance in 2013, when Ki Enthus Susmono became a candidate for Tegal Regent. It became a political style representing itself as a candidate for bupati who sided with the people. Messages delivered through langgam 'ana landa endase ireng' able to present the figure of Ki Enthus as a candidate for Regent anti-colonial and deliver Ki Enthus As the Regent Selected 2013-2018. This article will explain the meaning of ngapak language in wayang santri associated with the Election of Tegal Regent.*

Keyword: *Wayang Santri, Ngapak, Politic*

PENDAHULUAN

Saat ini Kabupaten Tegal memiliki dalang etnik dan unik yang bernama Ki Enthus Susmono. Ia merupakan lanjutan dari kelahiran dan dinamika tokoh-tokoh Kabupaten Tegal yang berhasil menjadikan karakter unik budaya Kabupaten Tegal terkenal, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keunikan itu, salah satunya, terlihat dari kepiawaian Ki Enthus Susmono dalam melahirkan sebuah karya original, "spesies baru" dalam dunia wayang golek yang bernama wayang santri. Dengan wayang santri, Ki Enthus Susmono mendakwahkan misi universalitas Islam (*rahmatan lil alamin*) dengan nuansa lokalitas yang kental atau *ngapak*¹. Melalui wayang santri pula, adagium *the person is political*

¹ Belum ada penjelasan memadai yang penulis dapatkan mengenai terminologi *ngapak*. Namun berdasarkan situasi dan motif yang disampaikan lawan bicara atau respon dari komunitas *wong wetan* (Jawa arus utama seperti Semarang, Pekalongan, Solo, Jogjakarta dan seterusnya), istilah *ngapak* diasumsikan sebagai logat bahasa (dan budaya) yang jauh dari pusat budaya Jawa yang berasal dari *wetan* (timur) sebagaimana kota-kota yang disebutkan di atas. Istilah ini pula yang mengonsepsikan bahasa Tegal dalam pelafalannya memberi nada tekan "k" pada suku kata yang berakhir dengan huruf A, I, U, E, O, seolah terpinggirkan dari budaya Jawa arus utama. Meski kata "bata", misalnya, tidak pernah mendapatkan imbuhan kata "k", tetapi oleh komunitas *wong wetan* menganggap orang Tegal melafalkannya dengan tambahan "k". Dengan istilah *ngapak* pula bahasa dan budaya Tegal dipeyoratifkan sebagai bahasa



dibumikan. Salah satu indikatornya adalah kelahiran diskursus *ngapak* yang berbunyi “*belanda endase ireng*”.

Diskursus tersebut mengandung pesan untuk selalu waspada kepada pribumi yang menjajah sesama pribumi, baik melalui agama, budaya, ekonomi maupun mekanisme politik. Istilah tersebut merupakan salah satu ‘anak budaya’ dari Wayang Santri dan semakin menggema pada kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tegal tahun 2013 yang khas dan unik dari kubu Enthus-Umi. Dalam Pilkada tersebut Ki Enthus Susmono yang berpasangan dengan Umi Azizah berhasil menjadi Bupati terpilih periode 2013-2018².

Kontestasi wayang sebagai penyemaian agama dan ideologi-ideologi politik telah lazim terjadi dalam belantara sejarah Indonesia. Menurut R. Firt, pertunjukan wayang memiliki delapan fungsi. Antara lain sebagai sarana kepuasan batin, sarana bersantai dan hiburan, sebagai sarana ungkapan jati diri, sarana integratif atau pemersatu, sebagai penyembuhan, sebagai sarana pendidikan, sebagai integrasi pada masa lampau dan sebagai lambang penuh makna dan mengandung kekuatan. Seni adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu³.

Sebagai sebuah produk budaya dengan berbagai fungsi dan kegunaannya, wayang tidak berhenti pada satu bentuk paten. Ia terus memproduksi dalam berbagai bentuk variasi-variasi budaya selaras dengan perkembangan zaman. Ini pula yang menjadikan wayang berkembang menjadi beberapa jenis, baik dari segi material bahan bakunya maupun ideologi yang diusungnya. Beberapa di antaranya adalah wayang kulit, wayang golek, wayang klithik, wayang beber, wayang orang dan wayang krucil. Di beberapa daerah juga bermunculan jenis wayang kontemporer seperti wayang suket, wayang kampung sebelah dan wayang santri. Perkembangan tersebut tidak lain karena persinggungan wayang dengan berbagai agama dan budaya kontemporer sehingga menjadikannya sebagai media yang dipercaya dalam mendiseminasikan gagasan-gagasan keagamaan atau ideologi-ideologi kontemporer lainnya dengan cara yang sangat halus. Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan beroperasi dan berusaha mendeskripsikan wayang dalam kaitannya dengan agama dan politik di Kabupaten Tegal.

INTERNALISASI AGAMA DAN POLITIK DI ALAM DEMOKRASI

Memperhatikan terma wayang santri, pada mulanya merupakan dua entitas yang berbeda; wayang dan santri. Sejarah dan perkembangan wayang—sebagaimana yang

pinggiran dan karenanya sebagai kelas budaya Jawa kedua setelah budaya Jawa arus utama yang didominasi oleh komunitas *wong wetan*. Dengan demikian istilah ini diciptakan dengan dasar untuk membonsai Kabupaten Tegal sebagai kelas budaya yang lebih rendah dalam struktur sosial kemasyarakatan lainnya.

²Tercatat ada lima Pasang Calon Bupati-Wakil Bupati telah mengantongi nomor peserta dari KPU Tegal. Secara berurutan lima pasang calon tersebut adalah, (1) Rojikin AH, SH, SE – Budhi Harto, SH, MM dari PDIP, (2) R. Himawan Kaskawa, SH, MH – dr. Budi Sutrisno, M. Kes dari Demokrat, Gerindra dan PKPB, (3) Drs. H. A. Fikri Faqih, MM – Drs. Kahar Mudakir dari PKS, Hanura, PKNU dan Partai Buruh, (4) Enthus Susmono, Phd – Dra. Hj. Umi Azizah dari PKB (5) dr. Edi Utomo – Drs. H. Abasari, M.Hum dari Partai Golkar, PAN, PPP.

³ Soetarno *Wayang Kulit: Perubahan Makna Ritual dan Hiburan*, (Surakarta; STSI Press, 2004). 164

telah dijelaskan di atas—adalah produk kebudayaan masa lalu yang bersifat selalu terbuka (*corpus* terbuka) bagi temu dan masuknya ajaran agama-agama, ide-ide budaya, ideologi dalam aktualisasinya. Sedang santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya. Santri sendiri, terdiri dari dua kelompok. Pertama, Santri mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren. Kedua, santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang⁴. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sejak awal santri adalah subjek elementer dalam menjaga dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Hipotesa yang terbangun mengenai wayang santri adalah gabungan dari dua terma yang berbeda tersebut membentuk istilah wayang santri yang dengan memperhatikan spirit-potensi wayang dan santri, dipahami bahwa wayang santri adalah kesenian yang digunakan sebagai alat mendakwahkan kebenaran ajaran agama Islam. Eksistensinya telah mapan sebagai pertunjukan wayang yang menginjeksikan nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang biasa dilakoni oleh para santri. Ia juga merupakan *genre* Islam politik *ngapak*, yang bumi dan peduli lokalitas. Setidaknya ini bisa diamati dari istilah-istilah yang dihasilkan dari pertunjukan wayang santri secara gamblang memasuki alam bawah sadar masyarakat Kabupaten Tegal. *Belanda endase ireng*, misalnya. Sebagai sebuah istilah yang tidak kosong dari latar belakang sejarah perpolitikan lokal, istilah tersebut juga merupakan media politik yang mampu mengirimkan pesan kepada siapa saja yang dianggap oleh Ki Enthus sebagai orang yang berbahaya dan karenanya harus ditinggalkan, tidak perlu dipilih.

Endas—Jawa Kromo adalah sirih—bagi sebagian kultur masyarakat Jawa adalah ungkapan kasar. *Endas*, dalam tradisi bahasa Jawa adalah leksikon yang merujuk pada kepala binatang, seperti *endas ayam*, *endas wedhus*, *endas iwak* dan seterusnya. Tetapi bagi masyarakat Kabupaten Tegal *endas* menjadi sebutan yang wajar untuk menunjuk kepala orang. Dalam konteks pencandraan lokal budaya Kabupaten Tegal pula, *belanda endase ireng* adalah istilah yang berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun. Belanda adalah penjajah berkulit putih berambut pirang, sedang *belanda endase ireng* adalah pribumi dengan berbagai jabatan di pucuk pimpinan yang mengartikulasikan kepemimpinannya sebagai cara menjajah dan menghabiskan kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya dengan berlindung di balik teks-teks demokrasi dan religiusisme. Karenanya istilah *belanda endase ireng* yang lahir dari ordo budaya pewayangan di Kabupaten Tegal menjadi menarik tidak saja dalam konteks budaya, lebih

⁴ Zamakhsyari Dhofier, 1983, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta, hlm. 51



dari itu. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh James P. Spradley bahwa ilmu apapun (termasuk tentang budaya wayang santri) sudah seharusnya tidak hanya berlaku bagi kajian keilmuan itu sendiri, melainkan harus menjadi sumbangan bagi tatanan kehidupan yang lebih baik (*politea, polis*).

Istilah *belanda endase ireng* yang pada mulanya hanya sekedar istilah kebudayaan ditransformasikan menjadi energi, kekuatan, kekuasaan, power, bagi masyarakat untuk menjaga kesadarannya untuk selalu berhati-hati, jeli, waspada mengenai dinamika politik yang berjalan. Foucault pernah berkata, “*Power is not institution, and not a structure... it’s the name that one attribute to a complex strategic situation in a particular society*”. Kurang lebih artinya adalah kuasa bukanlah suatu lembaga, bukan pula suatu struktur. Ia adalah nama yang diberikan orang pada situasi strategis yang rumit dalam suatu bagian masyarakat tertentu. Dengan statemen *belanda endase ireng*, Ki Enthus dengan Wayang Santri sebagai mediumnya sedang menjalankan fungsi *the person is political*, setiap pribadi adalah entitas politik.

Kenyataan ini sepertinya menegaskan dari pinggir peradaban Islam di pesisir pantai utara, wayang santri hadir sebagai media dakwah-politik yang menjaga nasionalisme. Dalam kategori kemanusiaan yang lain, setiap manusia adalah makhluk hidup yang dilengkapi dengan kuasa politik yang dengan bekal tersebut manusia dituntut untuk mengusahakan tata kehidupan bersama (*politea, polis*) yang baik dan adil. Kewajiban ini juga tidak bisa dilepaskan dalam konteks teologi (teologi politiche) yang menekankan pertanggungjawaban iman dan aqidah tidak hanya bersifat ritual, shalat, kebaktian dan seterusnya. Wayang santri menjadi paradigma kebudayaan yang mengintegrasikan agama, budaya dan politik dengan khas, unik dan original. Ia menjadi entitas yang menarik sekaligus mengejutkan terutama dalam Pemilihan Bupati tahun 2013⁵.

⁵ Selain menggunakan Partai Politik sebagai mesin politik, beberapa pasangan calon mengusung agama, person, simbol dan lembaga agama, untuk meraih dukungan konstituen yang dikemas secara sistemik-artistik. Pasangan calon Enthus-Umi, misalnya, menggunakan Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar di Kabupaten Tegal untuk meraih kemenangan. Fenomena ini berkait paut dengan posisi Enthus-Umi yang keduanya merupakan bagian dari struktur NU Kabupaten Tegal. Umi Azizah, ketua cabang Muslimat, sedang Ki Enthus adalah Komandan Satkorcab Banser. Ditambah pengaruh psikologi dan sejarah saat NU berpolitik praktis, NU hingga kini masih diharapkan mampu untuk menggalang dukungan paslon ini. Fenomena ini juga mengakibatkan pemahaman masyarakat yang menganggap NU adalah mesin politik itu sendiri.

Selain itu, simbol agama juga melekat pada pasangan Himawan-dr. Budi dengan memasang foto Gus Dur dan putrinya Yenny Wahid pada alat peraga kampanye. Tidak susah menemukan gambar Paslon ini bersanding dengan foto Gus Dur- Yenny. Gus Dur adalah Kyai yang disegani. Beliau adalah kyai yang mampu menjadi katalisator bagi heterogenitas bangsa ini. Penafsiran penulis, maksud dari pemasangan foto Gus Dur-Yenny selain menggalang massa dari berbagai agama dan budaya yang ada di Kabupaten Tegal, pasangan calon ini juga menisbatkan diri sebagai pewaris pemikiran dan gerakan politik yang merujuk pada Gus Dur. Berikutnya, tersiar kabar bahwa Pasangan Rojikin-Budhi didukung oleh Pon-Pes Giren-Cikura Tegal. Untuk Kabupaten Tegal, Pondok Pesantren Giren-Cikura adalah lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh. Selain diasuh Kyai yang kharismatik juga

Wayang santri yang merupakan produk kebudayaan, pasca mengalami transformasi menjadi “produk agama”, pada akhirnya menjadi produk politik. Wayang santri bukan lagi sekedar menjadi pemeran dalam medan dakwah yang mengajak pada kebaikan berdasarkan ketentuan agama, ia juga berperan sebagai mesin politik kultural. Keintimannya dengan medan budaya kabupaten tegal menjadikan wayang santri sebagai manifestasi politik Ki Enthus. Ini pula yang menjadikan Ki Enthus lahir sebagai aktor politik praktis. Ki Enthus mentransformasikan diri sebagai aktor politik dengan cara yang unik dan sekaligus enigmatik. NU dan Wayang Santri atau Ki Enthus dan Kyai-kyai NU membangun kekuatan politik yang didasarkan pada budaya dan agama dengan karakteristik lokalitas. Karakter Ki Enthus menyebar dalam berbagai segmen, termasuk Ulama. Kehadiran Ki Enthus dalam pengajian-pengajian ketika tidak melakonkan wayang oleh sebagian masyarakat disebut sebagai Kyai atau Ulama yang memberikan nasihat⁶. Kedekatan Ki Enthus dengan Ulama, baik secara organisasi maupun individu menjadikannya karakter keulamaan atau kekeayaannya mengental kuat. Ulama, Kyai baik dalam kapasitas pribadi maupun institusi memiliki peran dominan dalam mempengaruhi eskalasi politik di ranah lokal.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa ulama (yang dalam istilah lokal disebut Kyai) sebagai pemuka agama terlibat dalam persoalan politik. Pertama, bisa ditelusuri dari sumber ajaran agama Islam sendiri yang memiliki lingkup tidak hanya pada aspek ritual

telah mencetak banyak ustadz yang mensyiarkan agama Islam ahlussunnah wal jamaah di penjuru Tegal. Ustadz ini lah yang akan mengondisikan umat di tingkat akar rumput untuk mendukung pasalon ini. Jumlah ustadz, santri dan jamaah pengajian pondok pesantren yang mencapai ribuan ditambah loyalitas tinggi kepada Kyai, tidak bisa dianggap enteng oleh kandidat lain dalam Pilbup kali ini.

Bisa dibayangkan, jika seluruhnya menjadi pemilih Rojikin-Budi, asupan suara untuk paslon ini bisa ‘cetar membahana’. Berbeda dengan ketiganya, pasangan calon Fikri-Kahar yang kental dengan PKS, sejak awal menegaskan diri sebagai pasangan yang percaya diri dengan spirit cinta, harmoni dan kerja. Platform khas ini tetap menjadi suguhan utama untuk konstituen sembari meyakinkan citra bersih tetap melekat pada pasangan calon ini. Militansi massa dari PKS juga modal paten yang tidak diragukan lagi. Massa ini tidak mudah goyah dengan “bisikan” dari pihak lain. Meski memungkinkan sekali melakukan kompromi ideologi dengan kelompok masyarakat lainnya, hal itu membutuhkan energi dan komunikasi yang mungkin melelahkan. Dengan kenyataan ini, sepanjang tafsiran penulis, paslon ini agak susah menembus komunitas di luarnya. Atau mungkin sejatinya pasangan calon ini sedang menyimpan senjata rahasia yang kelak “diledakkan” pada saat yang tepat? Wallahu A’lam. Sedangkan untuk pasangan calon Edi-Abasari, terkenal sebagai pasangan yang ‘mlastar’ (suka berbagi). Meski kemudian dipeyoratifkan dan “melecehkan” warga Kabupaten Tegal dengan “mie instanisasi”. Kabar bagi-bagi uang dari pasangan calon ini pun sudah jamak didengungkan dan selalu diproduksi ulang di tengah masyarakat. Namun demikian, pasangan calon ini tetap diperhitungkan.

⁶ Contohnya saat menjadi pembicara dalam acara khotmil quran di Dukuh Kemlaten Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Ini tercermin dari pertanyaan yang mereka sampaikan di arena pengajian....“kyaine wis teka?”. Maksudnya adalah orang yang akan memberikan nasihat atau taushiyah dalam pengajian tersebut yang dalam hal ini, sebagaimana undangan yang disebarkan panitia, adalah Ki Enthus Susmono.



dan bimbingan moral tetapi juga pada nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persolan politik. Sekalipun ajaran Islam lewat kitab suci Alquran memberikan tuntunan yang bersifat garis besar tetapi tidak sedikit ajaran-ajaran yang memberikan pesan-pesan mengenai kehidupan bersama, termasuk tentang negara. Demikian pula di dalam ajaran Islam yang kedua, yaitu Hadits, selain membawa risalah, Rosulullah Muhammad SAW juga sosok negarawan sehubungan dengan posisinya sebagai kepala negara.

Kedua, dilihat dari sisi sejarahnya, keterlibatan ulama dalam politik telah terlihat sejak dalam berdemokrasi bangsa ini tidak saja dapat dilihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah, melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplomasi. Baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan diproklamirkan. Peran para ulama lebih nampak pada saat sejumlah pesantren ditempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah, banyak para ulama yang memberikan dukungan moral, ekonomi, maupun politik.

Pendapat bahwa peran politik ulama terbentuk oleh faktor sejarah juga diakui oleh M. Dawan Rahardjo. Ia menjelaskan pada zaman kerajaan Islam di Jawa secara tidak resmi diadakan pemisahan antara urusan negara yang dipegang oleh para sultan dan urusan agama yang dipegang oleh para ulama. Pemisahan ini justru semakin memperkokoh posisi ulama karena banyak masalah sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari keberagaman rakyat yang harus ditangani oleh ulama. Akibatnya dalam sejarah perjuangan bangsa, ulama dapat dipahami sebagai pusat kekuatan sosial politik yang perannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ketiga, posisi ulama sebagai elit agama yang bisa memobilisasi massa dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, menjadikan mereka terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, serta menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, pengembangan pendidikan, dan kemasyarakatan. Ulama dalam mensyiarkan dakwah dan misinya membutuhkan pengaruh dari penguasa. Dakwah akan lebih mudah dan berhasil karena didukung dan mendapat izin legitimasi dari pihak yang memegang kekuasaan.

Berkaitan dengan kondisi di atas, Kiai di Jawa biasanya mempunyai pengaruh yang lintas desa. Sebagian bahkan mempunyai pengaruh nasional. Posisi seorang kiai di sebuah pesantren dan keterlibatannya di NU dapat membuatnya menjadi pemimpin nasional umat Islam Indonesia. Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekhiaian seseorang. Melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola patronase yang menghubungkannya dengan masyarakat. Pola patronase ini dapat dengan mudah dibangun karena kebanyakan, jika tidak semua, pesantren dimiliki secara pribadi oleh kiai⁷.

Labeling seperti ini memang disandarkan atas realitas bahwa NU sebagai organisasi pernah melakukan tindakan politik untuk membela Soekarno dalam menggoalkan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom), yang saat itu dianggap sebagai sebuah konsepsi yang salah oleh organisasi sosial keagamaan lainnya, sebab menempatkan agama dan komunis dalam satu bangunan konsep. Selain itu NU

⁷ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Jogjakarta; LKiS, 2004), 101



juga pernah mengangkat Soekarno sebagai Waliy al-amri dharury bi al-syaukah, yang dianggap oleh lainnya sebagai langkah oportuniste politik. Pengalaman kesejarahan inilah barangkali yang menjadi asosiasi Ki Enthus dengan Wayang Santrinya dan merepresentasikan diri sebagai pembela agama dan negara dalam ranah lokal. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para Kyai sebelumnya.

MERAWAT DEMOKRASI DI RANAH LOKAL

Ali Maschan Moesa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa para Kyai dalam memandang hubungan agama dan politik sebagai traditional *religio-political system*, yaitu sistem kemasyarakatan yang tidak ada pemisahan antara komunitas politik dan komunitas keagamaan. Pandangan seperti inilah yang menempatkan para Kyai pada posisi sulit dan dilematis. Kesulitan terjadi karena mereka hasus membawa misi yang berbasis spiritual ke dalam praksis politik yang bersifat profan. Ia juga menyimpulkan bahwa paradigma hubungan agama antara dan politik yang integralistik selalu mengakibatkan implikasi yang tidak menguntungkan. Pertama, agama diposisikan sebagai instrumen politik, dan kedua, persentuhan tersebut selalu menimbulkan radikalisasi politik atas nama agama, bahkan sering terjadi pembunuhan terhadap lawan politik atas nama Tuhan⁸.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang mengalami tekanan serius dalam pola keberagamaan dan politik. Keduanya, meski diyakini sebagai entitas yang berbeda, namun dalam prakteknya tak jarang saling melengkapi. Baik untuk kepentingan agama maupun politik itu sendiri. Hingga tak jarang, dengan dukungan sistem politik, masing-masing kelompok keagamaan yang berada di Indonesia bertikai mempertahankan eksistensi sekaligus kekuasaannya. Begitu pula sebaliknya.

Foucoult juga menganggap bahwa kekuasaan bukan suatu lembaga, karena bagi Foucoult kekuasaan terdapat di mana-mana (*power is everywhere*), entah dalam hubungan antar manusia maupun dalam lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut Foucoult mengatakan bahwa kekuasaan merupakan situasi strategis. "*Power is not institution, and not a structure..., it's the name that one attribute to a complex strategical situation in a particular society*". Kuasa bukanlah suatu lembaga, bukan pula suatu struktur. Ia adalah nama yang diberikan orang pada situasi strategis yang rumit dalam suatu bagian masyarakat tertentu⁹.

Pandangan Foucoult ini, dalam batas-batas tertentu, menjadi alat telisik mengenai fenomena keberagamaan yang sedang berjalan saat ini. Misalnya saja yang sedang berlangsung di tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam catatan Van Bruinessen, NU sedang mengalami apa yang penulis sebut sebagai "perampokan" infrastuktur dan ideologi oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagian masjid-masjid Nahdlatul Ulama telah dikuasai oleh gerakan Islam radikal yang menhendaki pendirian Khilafah Islamiyah. Mula-mula gerakan radikal ini hanya menjadi pengunjung hingga pada

⁸ Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya; LEPKISS) 1999.

⁹ Otto Sukatno CR, *Seks Para Pangeran: Tradisi Dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*, (Yogyakarta ; Bentang Budaya, 2002), 66





saat yang tepat mereka kemudian menguasai mimbar-mimbar khutbah. Kampanye mengenai Khilafah Islamiyah sembari mengutuk Pancasila sebagai manifestasi sekularisasi, dan karenanya kafir, selalu didengungkan. Labelisasi kafir tak lagi sebagai makna teologis, namun telah merambah atau bertransformasi dalam pengertian politik. Setiap sistem yang tidak berdasarkan pada konsepsi *La hukma illa Allah* adalah wajib dihancurkan. Kondisi ini dalam pandangan NU tentu sangat mengkhawatirkan. Selain perbedaan genealogi keilmuannya, orientasi yang dimunculkan dalam gerakan keislamannya juga berbeda dengan NU.

NU dengan berbagai Badan Otonomnya telah melakukan berbagai terobosan yang lunak, kokoh dan terfokus dalam mengelaborasi pesan-pesan Islam dalam kehidupan nyata. Lunak dalam pengertian dapat merasuk ke dalam struktur sosial dengan leluasa, kokoh dalam pengertian tidak mudah goyah dengan hempasan ideologi yang mementahkan Islam. Terfokus dalam pengertian berorientasi kemanusiaan dalam “ruang-ruang dalam” sosial kemasyarakatan. Diharapkan pula masyarakat awam menerima dan merasakan pesan tersebut dengan nyaman sehingga meneruskan dan menyebarkan kedamaian dalam komunitas yang lebih luas.

Wayang santri berada dalam jalur ini. Antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi wayang santri menjadi salah satu indikatornya. Ia menjadi bagian integral dengan masyarakat NU khususnya dan masyarakat kabupaten tegal pada umumnya. Nilai-nilai perjuangan, kesetaraan, kepedulian yang ditampilkan wayang santri kemudian diterjemahkan dalam wilayah birokrasi pemerintah kabupaten tegal, institusi dimana Ki Enthus Susmono menjadi bupati. Idiom-idiom *ngapak* dan *membumi* telah diintegrasikan dalam jajaran birokrasi yang dulu terkesan ngawang-ngawang. Keuntungan dari integrasi ini memperkuat jalinan emosional dan etnisitas dalam internal masyarakat kabupaten tegal.

Salah satu contohnya adalah program filantropi yang diterjemahkan dalam istilah “*Ngrogoh kantong wekena wong*”. Konsepsi ini beroperasi dalam mengawal jajaran birokrasi untuk menumbuhkan semangat berbagi rezeki kepada masyarakat kabupaten tegal. Idiom atau istilah *ngapak* telah merontokkan jarak birokrasi yang terkesan elit dengan masyarakat yang awam. Barangkali inilah kekuatan diskursus *ngapak* yang dilakukan oleh Enthus Susmono.

Membangun sistem birokrasi lokal dengan mengintegrasikan semangat keberagaman dalam konteks nasional adalah sama dengan menempatkan pasangan “puzzle” sehingga membentuk gugusan kekuatan birokrasi yang humanis. Kekhasan yang menjadi milik konstruksi sosial Kabupaten Tegal tidak kemudian diartikan sebagai “inferiority complex” hanya karena jauh dari sumber historis-peradaban awal, Mataram Islam. Sebaliknya, keunikan ini menjadi corong dalam menginterpretasikan tradisi ushul fiqih “*al-muhafazhah al-al-qadim ash-shalih wal akhdz bil jadid al-ashlah*”. Sehingga tercipta tatanan politik dan birokrasi yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Karena dalam Islam, kebijakan pemimpin haruslah bertumpu pada kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana dirumuskan dalam kaidah hukum Islam “*tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bi-l mashlahah*”. Meski demikian, fenomena di atas masih terus diuji



dalam hal keberpihakan kepada rakyat kendati secara kuantitatif pada tahun 2017 telah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK¹⁰. □

DAFTAR PUSTAKA

- CR, Otto Sukatno. (2002). *Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*, Yogyakarta ; Bentang Budaya.
- Dhofier, Zamakhsyari,. (1983). *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta; LP3ES.
- Moesa, Ali Maschan. (1999). *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya, LEPKISS.
- Soetarno,. (2004). *Wayang Kulit: Perubahan Makna Ritual dan Hiburan*, Surakarta; STSI Press.
- Turmudi, Endang. (2004). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Jogjakarta; LkiS.
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/akhirnya-pemkab-tegal-terima-opini-wtp-bpk-ri/>

¹⁰ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/akhirnya-pemkab-tegal-terima-opini-wtp-bpk-ri/>

